

Implementasi Program SIPRAJA Dalam Mewujudkan Pelayanan Berbasis E-government Pada Pemerintah Desa Penambangan

Khoirun Nisak

192020100102

Dosen Pembimbing

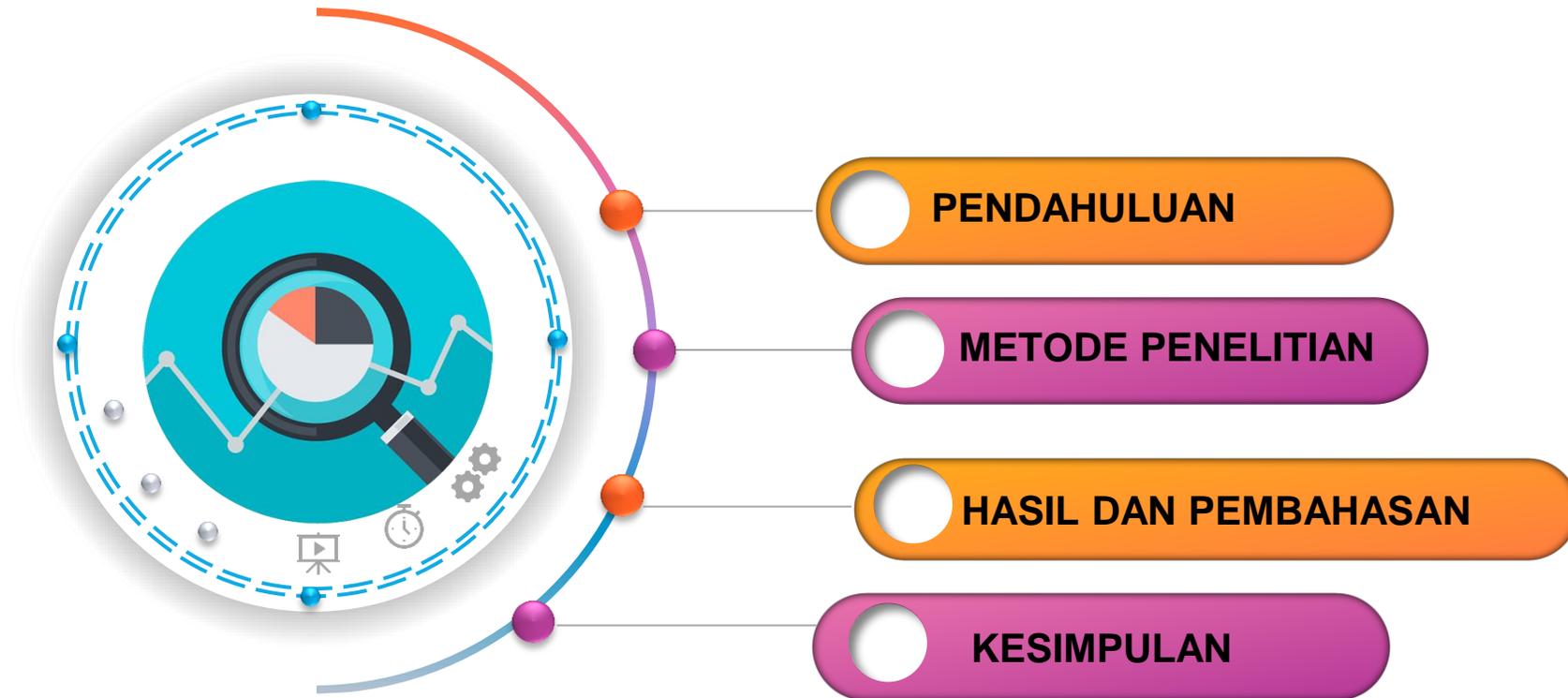
Hendra Sukmana, M.KP

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023



Pembahasan



Pendahuluan

Pelayanan Kependudukan di Indonesia

Penggunaan teknologi yang berkembang pesat memegang peranan penting dalam kehidupan di era globalisasi saat ini. Bukti bahwa birokrasi Indonesia sedang melakukan revolusi industri adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Wujud birokrasi merupakan keinginan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dari korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN) serta mampu menyediakan pelayanan yang prima dengan cepat, tepat dan efisien. Selain itu, juga pemerintah juga berperan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat.

Penerapan *E-Government*

Salah satu teknologi informasi yang memberikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia adalah penerapan *elektronik government (e-government)*. *E-Government* merupakan proses yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dan saat ini difokuskan pada penerapan *e-government*. Adminisrasi elektronik berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuat informasi tersedia untuk publik secara lebih efisien.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 mengenai pengembangan dan pendayagunaan telematika yang menginstruksikan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi.
- SK Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kota Cerdas (Smart City) di Kabupaten Sidoarjo

Implementasi Kebijakan

Menurut T.B. Smith bahwa suatu kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Pendahuluan

Penerapan SIPRAJA

Aplikasi SIPRAJA merupakan salah satu bentuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat, karena aplikasi ini terkoneksi dengan seluruh kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk melakukan pelayanan pengurusan secara manual dalam segala kepentingan di Dinas ataupun Kecamatan. Aplikasi Sipraja hanya bisa digunakan pada satu akun saja dengan memasukkan NIK dan *Password*. Aplikasi SIPRAJA ini terdapat 6 tipe pelayanan yang disediakan. Pengurusan dari 6 tipe tersebut bisa mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Tabel 1.
Data Pengguna Aplikasi SIPRAJA di Desa Penambangan

No	Keterangan	Pengajuan Pelayanan		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	SK Domisili Luar	-	-	-
2	SK Domisili Usaha	2	195	3
3	SK Keterangan Umum	-	6	2
4	SK Tidak Mampu	1	33	254
5	Surat Kelahiran	3	5	1
6	Surat Kematian	-	-	-
7	Surat Pengantar KUA	-	-	-
8	Surat Pengantar KUA Luar	-	-	-
9	Surat Permohonan Biodata	-	3	1
10	Ijin Keramaian	-	-	-
11	Permohonan KTP	-	-	2
12	SKTM Kecamatan	-	6	79
13	SK Umum Kecamatan	-	2	-
14	SP SKCK	-	-	-
15	Surat Permohonan KK	-	-	6
16	Surat Permohonan Pindah	-	-	-
17	Waris	-	-	-
Total		6	250	348

Permasalahan yang Dijumpai

1. Tidak stabilnya jaringan internet yang mengakibatkan:

- Aplikasi mengalami trouble saat pemohon sedang upload data
- Halaman menjadi putih semua pada saat awal membuka aplikasi SIPRAJA

2. Kurangnya sosialisasi aparat Desa Penambangan terkait dengan aplikasi SIPRAJA

3. Masih awamnya masyarakat dengan penggunaan aplikasi SIPRAJA



Penelitian Terdahulu

Penelitian Aina Shafira & Ardita Kurniasiwi, 2021 berjudul “Implementasi E-Government Dalam Upayah Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo”. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengenalan *e-government* di Kab. Kulon Progo dapat dikatakan belum efektif karena Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki kekurangan dalam penggunaan aplikasi dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan adanya pemeriksaan kinerja melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), diharapkan penggunaan aplikasi dapat lebih ditingkatkan sehingga pelayanan akurat, serta pengelolaan dan pembiayaan yang moderat sehingga bisa tepat waktu dan akurat.

Penelitian Dema Prayuda Saputra & Agus Widiyarta, 2021 dengan judul “Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelayanan publik melalui aplikasi SIPRAJA berjalan efektif di wilayah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Namun, pelayanan yang diberikan melalui aplikasi SIPRAJA mengalami kendala terkait masalah teknis yang dihadapi pada aplikasi dan masyarakat yang memilih untuk melakukan pelayanan secara manual.

Penelitian Aditama Azmy Musaddad, W.K. Faizin Ahzani, dkk, 2020 penelitian sebelumnya “Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik”. Hasil kajian berikut menunjukkan bahwa dari dimensi struktur birokrasi. Kelurahan sudah melaksanakan SOP dengan baik dan pelaksanaan SIPRAJA bersifat hirarki dengan Diskominfo memimpin masyarakat daerah, masyarakat kelurahan dan desa. Namun terdapat kendala pada pengajuan yang mana tidak semua surat dapat diproses melalui aplikasi SIPRAJA, seperti: surat lamaran dalam negeri, maupun surat yang berada di luar aplikasi, sehingga harus dilakukan secara manual. Selain itu, tidak semua surat bisa diproses oleh SIPRAJA, terdapat permasalahan lain seperti dimensi komunikasi, kurangnya masyarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi SIPRAJA. Dalam hal ukuran sumber daya dan pengaturan, SDM sering menghadapi masalah teknis.

Metode

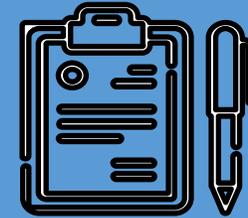


Tempat Penelitian :

Penelitian ini berlokasi pada Kantor Kepala Desa Penambangan

Teknik Pengumpulan Data:

- Primer: Wawancara, Observasi, Dokumentasi
- Sekunder : Jurnal dan Berita Media Massa



Jenis Penelitian :

Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif

Fokus Penelitian :

Implementasi Program SIPRAJA Dalam Dalam Mewujudkan Pelayanan Berbasis E-government Pada Pemerintah Desa Penambangan



Metode

Teknik Penentuan Informan:
Purposive Sampling



Teknik Analisis Data: Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan



Teori Implementasi Kebijakan:

Menurut T.B. Smith implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

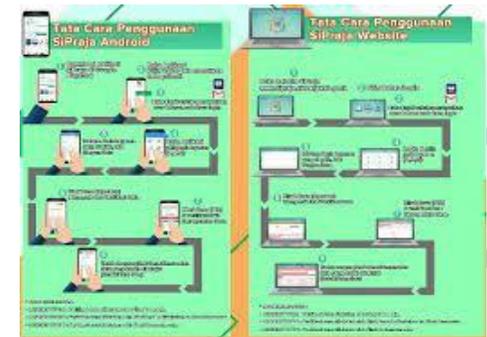
1. *Idealized policy*
2. *Target groups*
3. *Implementing organization*
4. *Environmental factors*

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang didasari oleh teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh T.B. Smith (dalam Islamy, 2001), bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel berikut:

Kebijakan yang diinginkan (*Idealized Policy*)

Kebijakan yang diinginkan (*idealized policy*) menurut Smith (dalam Islamy 2001:80-81) merupakan suatu pola interaksi yang digagas oleh pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mendorong target sasaran dalam melaksanakannya. Aplikasi SIPRAJA merupakan inovasi dalam pelayanan, mengingat dimana pemanfaatan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, yang mana menjadi tujuan dari tata kelola teknologi informasi. Aplikasi SIPRAJA ini sudah diluncurkan pada September 2019. Program ini merupakan salah satu inovasi nyata Pemerintah Desa Penambangan dalam implementasi untuk pemerataan pemanfaatan teknologi secara optimal dan mengurangi pelayanan tatap muka pada pelayanan publik di Pemerintah Desa Penambangan, selain itu juga dapat mepurangi terjadinya pemungutan biaya yang tidak jelas terkait dengan kegunaannya. Aplikasi SIPRAJA ini diterapkan dalam berbasis *online* melalui bentuk aplikasi dan laman *website* www.sipraja.sidoarjoekab.go.id. Sehingga dengan adanya program SIPRAJA ini masyarakat di Desa Penambangan dapat mengajukan pelayanan dari rumah.



Hasil dan Pembahasan

Target Sasaran (*target groups*)

Menurut Smith (dalam Islamy 2001:80-81) target sasaran merupakan bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Pemerintah Desa Penambangan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. Salah satunya dengan penggunaan aplikasi SIPRAJA, dimana masyarakat menjadi sasaran utama suatu kebijakan dengan pengawasan optimal agar tetap sesuai dengan konsep sasaran yang ada. Dalam penelitian ini antusias masyarakat Desa Penambangan terkait dengan adanya pelayanan secara *online* sangat mendukung, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait dengan penggunaan aplikasi SIPRAJA. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan aplikasi SIPRAJA, hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk melakukan pengajuan administrasi secara *online* [5]. Masyarakat masih mengandalkan pelayanan secara manual dengan bantuan petugas aparaturnya desa, hal ini mengakibatkan penumpukan berkas pada kantor pelayanan. Pemerintah Desa Penambangan perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat Desa Penambangan dapat menjalankan pengajuan yang mereka buat dengan secara online

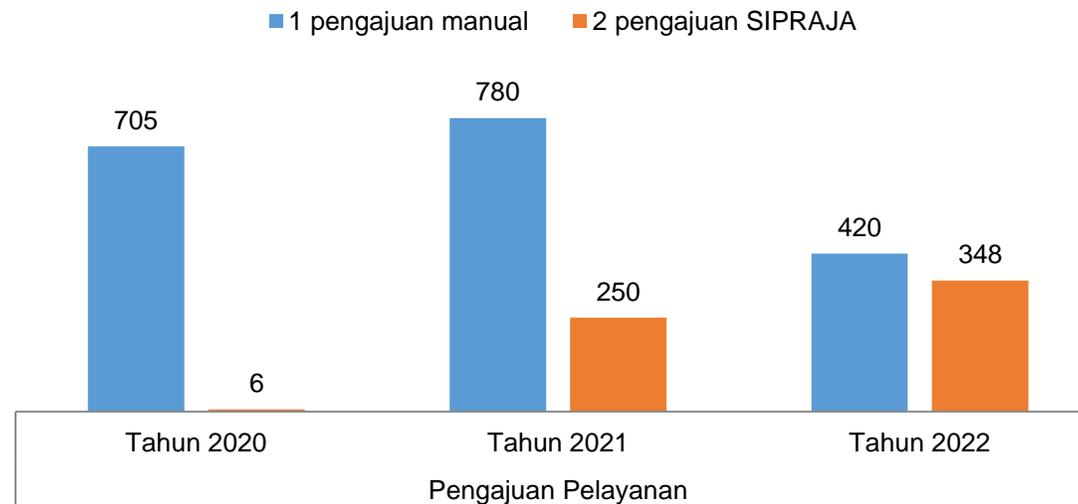
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Penambangan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-4 Tahun	475
2	5-14 Tahun	853
3	15-24 Tahun	1.355
4	25-40 Tahun	1.895
5	41 Tahun Keatas	1.553
Jumlah Total		6.131

Sumber: bpdpenambangan.blogspot.com

Hasil dan Pembahasan

Grafik 1. Perbandingan Pengajuan Secara Manual dan Melalui SiPRAJA

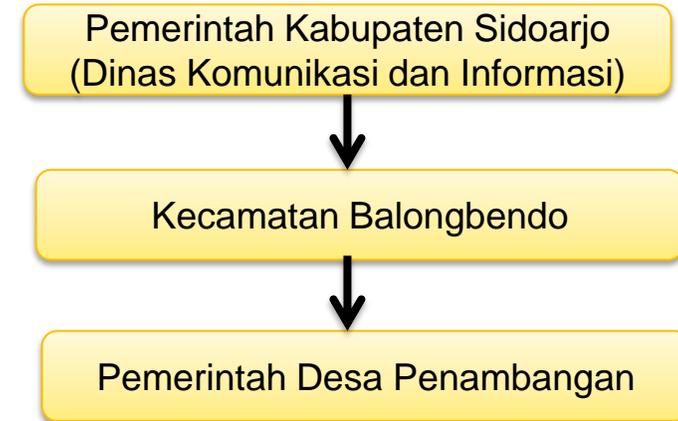


Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Hasil dan Pembahasan

Organisasi Pelaksana (*implementing organization*)

Pelaksana merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang mewujudkan suatu rencana yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari suatu program tersebut dapat tercapai. Dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan suatu kelompok sasaran [15]. Kebijakan tidak akan terlaksana apabila penanggung jawab dari sebuah kebijakan tidak melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Menurut Smith (dalam Islamy 2001:80-81) organisasi pelaksana adalah badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.



Gambar 2. Struktur Birokrasi Pelaksanaan Program SIPRAJA

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Lingkungan (*environmental factors*)

Lingkungan strategis merupakan lingkungan yang sangat memengaruhi suatu organisasi, dimana lingkungan strategis ini terbagi menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal [8]. Faktor-faktor lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan atau kegagalan suatu organisasi. Menurut Smith (dalam Islamy 2001: 80-81) faktor-faktor lingkungan merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial ekonomi dan politik. Pelaksanaan implementasi aplikasi SIPRAJA ini menjadikan perubahan budaya mengantri pada masyarakat yang mana selama ini masyarakat melakukan pelayanan administrasi kependudukan dengan mengantri satu demi satu, sehingga pada saat ini masyarakat tidak perlu lagi. aplikasi SIPRAJA juga sering mengalami error saat digunakan oleh banyak masyarakat. Selain itu, aplikasi SIPRAJA juga sering mengalami *troubel* dimana pada saat membuka aplikasi layar pada halaman utama hanya berwarna putih. Sehingga membuat masyarakat enggan untuk melakukan pelayanan secara *online*.

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam implementasi program SIPRAJA dalam mewujudkan pelayanan berbasis e-government pada Pemerintah Desa Penambangan. Pada pelaksanaan pelayanan secara online menggunakan aplikasi SIPRAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Penambangan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Dengan adanya aplikasi SIPRAJA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintah. Antusias masyarakat dengan adanya pelayanan secara online sangat berkontribusi. Akan tetapi pada penerapan aplikasi SIPRAJA masih terdapat kendala yaitu masyarakat yang masih belum tanggap dan mengerti akan penggunaan aplikasi SIPRAJA. Terdapat banyak masyarakat yang masih melakukan pelayan secara manual dengan mendatangi kantor pelayan Desa Penambangan. Penerapan aplikasi SIPRAJA pada Pemerintahan Desa Penambangan dalam variabel organisasi pelaksana sudah melakukan dengan semaksimal mungkin, para aparatur sudah memahami terkait penggunaan aplikasi SIPRAJA dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam sosialisasi aparatur Desa Penambangan masih belum cukup untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Faktor lingkungan juga menjadi salah satu variabel dalam implementasi aplikasi SIPRAJA. Dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan teknologi, jaringan menjadi kunci untuk pelaksanaannya. Tidak stabilnya jaringan menjadi hambatan pada pelayanan melalui aplikasi SIPRAJA, pada Kantor Pemerintahan Desa Penambangan jaringan kurang stabil sehingga membuat aplikasi tidak berjalan secara maksimal. Terkadang aplikasi SIPRAJA juga mengalami *troubel* yang mengakibatkan layar tampilan menjadi wanra putih.

Referensi

- [1] I. M. El-Haq, "Penerapan Teknologi Informasi Dalam Birokrasi Publik di Kantor Desa Kebonagung," *Praja Obs. J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 2, no. 04, pp. 99–104, 2022.
- [2] G. Gamaputra, N. Aini Rosalia, R. Kusyeni, and P. Vokasi, "Penerapan Standar Pelayanan Publik melalui Aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di Kantor Kelurahan Celep," *J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 5, no. 2, pp. 81–96, 2022, [Online]. Available: <https://www.sidoarjokab.go.id/>
- [3] N. K. A. S. Adi, "Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Prinsip Efektivitas Pada Pelayanan Pembuatan E-KTP di Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang," *J. Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 11, no. 1, pp. 352–366, 2023.
- [4] N. Selawati, "Jurnal Syntax Transformation," vol. 3, no. 3, pp. 147–156, 2022.
- [5] D. P. Saputra and A. Widiyarta, "Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo," *JPAP J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 194–211, 2021, doi: 10.30996/jpap.v7i2.4497.
- [6] V. N. Chrismonita, D. Adriantini, and S. Dewi, "Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance)," vol. 2, no. 2, pp. 64–89, 2020.
- [7] A. Shafira and A. Kurniasiwi, "Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo," *J. Caraka Prabhu*, vol. 5, no. 1, pp. 52–68, 2021, doi: 10.36859/jcp.v5i1.457.

- [8] S. Samantha, "Implementasi Kebijakan Publik Melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (Implementation ...," 2022.
- [9] P. Sub-district, "No Title".
- [10] S. Ranna, "Implementasi Kebijakan Program Pengawasan Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi," *JISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 4, pp. 311–315, 2019, [Online]. Available: <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1965>
- [11] A. Juliarso, "Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis," *Kebijak. J. Ilmu Adm.*, vol. 10, no. 1, p. 10, 2019, doi: 10.23969/kebijakan.v10i1.1417.
- [12] J. F. Purba, U. Tarigan, I. Nasution, and A. Suharyanto, "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik," *Perspektif*, vol. 8, no. 2, pp. 77–83, 2019, doi: 10.31289/perspektif.v8i2.2597.
- [13] I. Hasibah, Hayat, and H. Anadza, "EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN ONLINE KEPENDUDUKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)," *J. Publicuho*, vol. 5, no. 4, pp. 1027–1040, 2022, doi: 10.35817/publicuho.v5i4.47.
- [14] Ismail and M. Ismail, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut," *Registratie*, vol. 4, no. April, pp. 22–31, 2022.
- [15] T. Prasaja and E. Wiratno, "Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten," *J. Insitusi Politek. Ganésa Medan*, vol. 2, no. 1, pp. 116–123, 2019.
- [16] C. A. Londong, D. Saerang, and R. Koleangan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Manado," *J. Pembang. Ekon. Dan Keuang. Drh.*, vol. 17, no. 2, 2019, doi: 10.35794/jpekd.10251.17.2.2015.
- [17] Alex, Ed., "CamScanner 11-06-2023 08," in *PEMBAHASAN ADMINISTRASI, ORGANISASI, DAN MANAJEMEN, PERTAMA*. YOGYAKARTA: CAPS (Center for Academic Publishing Service, 2019, p. 11.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



TERIMA KASIH

